

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang Penelitian

Saat ini, perusahaan melakukan penerbitan saham sebagai salah satu cara perusahaan ketika membutuhkan pendanaan. Sebanyak 709 perusahaan *go public* yang terdaftar melakukan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (Bursa Efek Indonesia, 2020). Di sisi yang lain, para investor memilih instrumen saham karena investor meyakini saham mampu memberikan tingkat keuntungan yang menarik. Saham memiliki arti sebagai tanda penyertaan modal yang diberikan seseorang atau pihak seperti badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Pemegang saham yang memberikan modal di perusahaan memiliki klaim atas *asset* perusahaan, dan memiliki hak untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Saham yang dibeli oleh investor dapat memberikan keuntungan berupa dividen dan *capital gain*.

Dividen didefinisikan sebagai pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan dan berasal dari keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Dividen diberikan perusahaan setelah mendapat persetujuan dari pemegang saham dalam RUPS. Umumnya seorang pemodal untuk mendapatkan dividen harus memegang saham tersebut dalam jangka waktu yang relatif lama, hingga kepemilikan saham berada dalam periode dimana diakui sebagai pemegang saham yang berhak mendapatkan dividen. Bentuk dividen yang dibagikan perusahaan dapat berupa dividen tunai, yang berarti setiap pemegang saham diberikan dividen berupa uang tunai dalam jumlah rupiah tertentu untuk setiap saham / dapat berupa dividen saham yang berarti setiap pemegang saham diberikan dividen sejumlah saham sehingga jumlah saham yang dimiliki seorang pemodal akan bertambah dengan adanya pembagian dividen saham tersebut. *Capital Gain* didefinisikan sebagai selisih antara harga beli dan harga

jual. *Capital gain* terbentuk karena adanya aktivitas perdagangan saham di pasar sekunder.

Dividen yang dibagikan oleh perusahaan kepada pemegang saham perlu memperhatikan saldo kas yang dimiliki oleh perusahaan agar dapat memenuhi kebutuhan yang akan datang, seperti pertumbuhan aset dan pembayaran kewajiban yang ada. Kebijakan dividen diperlukan untuk menentukan perbandingan antara laba yang digunakan sebagai pembayaran dividen dan laba yang digunakan untuk kelangsungan pertumbuhan perusahaan sebagai laba ditahan (Ardiyos, 2010:338).

Perusahaan adalah organisasi yang melibatkan banyak pihak, seperti manajer, karyawan, pelanggan, kreditor, pemasok, dan investor / pemegang saham. Pemegang saham mendapat perhatian khusus karena merupakan pihak yang menyediakan dana bagi perusahaan seperti kreditor (*bondholder*). Selain itu, pemegang saham mempunyai tanggung jawab paling besar di antara *stakeholder* perusahaan. Jika kreditor, karyawan, pemasok, dan pelanggan memiliki kemudahan untuk meninggalkan perusahaan, tidak demikian dengan kebanyakan pemegang saham. Sering adanya asumsi bahwa pemegang saham berinvestasi untuk seumur hidup dan sebagian besar kekayaannya tertanam di sebuah perusahaan saja (kurang terdiversifikasi). Oleh sebab itu, pemegang saham memerlukan tawaran imbal hasil yang menarik agar bersedia menanggung risiko yang lebih besar tersebut. Salah satunya adalah hak untuk mengelola perusahaan (*control of the firm*).

Masalah terjadi saat pemegang saham dalam suatu perusahaan terlalu banyak dan memiliki peran aktif dalam mengelola perusahaan. Pemecahannya adalah mendelegasikan pengendalian perusahaan kepada manajer profesional (*agent*) yang disebut "*separation of ownership and control*" (Adolf Berle dan Gardner Means, 1932). Pemisahan kepemilikan dan kendali berpotensi menimbulkan konflik kepentingan antara pemegang saham (*principal*) dan manajer (*agent*) yang sering disebut masalah keagenan (*agency problem*). Masalah agensi menimbulkan biaya yang disebut biaya agensi. Jensen (2000) mengatakan biaya agensi merupakan biaya perusahaan yang ditimbulkan

karena perilaku oportunistik manajer yang berfokus pada tujuan pembangunan kekayaan, konsumsi berlebihan, pengambilan keputusan investasi yang tidak optimal, kesalahan akuntansi, atau penipuan perusahaan. Hal tersebut membawa dampak yang merugikan sehingga dapat menurunkan kinerja keuangan perusahaan dan kekayaan pemegang saham sehingga memiliki efek yang lebih luas pada pemangku kepentingan perusahaan lainnya (Furtuna dan Aras, 2015).

Manajemen yang seharusnya bekerja untuk memaksimalkan kepentingan pemegang saham, justru berusaha untuk memaksimalkan kepentingan diri sendiri (*moral hazard*). Salah satu bentuk pertanggungjawaban manajer kepada pemegang saham adalah kualitas laporan keuangan yang digunakan sebagai landasan dalam kebijakan dividen. Sebagai manajer yang telah diberikan kepercayaan untuk mengambil keputusan dalam perusahaan, maka manajer (*agent*) harus bertanggung jawab atas wewenang yang diberikan dan berkewajiban dalam meningkatkan nilai perusahaan dengan memaksimalkan kemakmuran dari pemilik atau pemegang saham (*principal*) (Djabid, 2009). Pemodal / pemegang saham mengharapkan untuk mendapatkan pembayaran dividen yang stabil bahkan lebih tinggi dari pihak manajemen, namun manajemen lebih mengharapkan untuk tidak membayarkan dividen dan menahan pendapatan yang didapatkan sebagai laba ditahan (Djabid, 2009). Penerapan tata kelola perusahaan (*good corporate governance*) dalam kegiatan operasional perseroan merupakan pengelolaan perusahaan secara profesional dan terjadi pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan.

Di dalam laporan tahunan perusahaan di Indonesia dapat ditemukan tata kelola perusahaan yang dibuat dengan mengikuti prinsip-prinsip tata kelola perusahaan (transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kesetaraan). Struktur tata kelola perusahaan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Struktur tersebut berisi rapat umum pemegang saham, dewan komisaris, dan direksi. Dewan komisaris dan direksi secara bersama bertanggung jawab atas kelangsungan usaha perusahaan dalam jangka panjang. Direksi perusahaan

merupakan organ perusahaan yang bertanggung jawab atas pengelolaan, pengurusan kepentingan perusahaan sesuai dengan tujuan dan ketentuan anggaran dasar perusahaan. Dewan komisaris bertanggung jawab terhadap kinerja pengelolaan perusahaan dengan melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi atas kegiatan pengurusan direksi. Anggota dewan komisaris tidak mengambil dan menerima keuntungan pribadi dari perseroan, dalam melaksanakan tugas dewan komisaris bertanggung jawab kepada RUPS yang merupakan perwujudan prinsip akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan perusahaan dalam prinsip *good corporate governance*.

Keputusan yang diambil oleh dewan komisaris akan memberikan kontribusi yang penting dalam memantau tata kelola internal perusahaan sehingga memiliki kinerja yang lebih baik (Hatane et al., 2019). Beiner et.al (2004) berpendapat bahwa ukuran dewan komisaris dapat menunjukkan tingkat efektivitas mekanisme tata kelola perusahaan yang dapat mengurangi biaya agensi. Menurut Chakraborty et.al (2018), semakin besar jumlah anggota dewan komisaris maka semakin sedikit resiko yang dialami perusahaan karena pemantauan yang lebih baik. Haider dan Fang (2016) berpendapat bahwa semakin besar ukuran dewan komisaris maka semakin luas perspektif yang diberikan. Ukuran dewan komisaris yang lebih besar lebih efektif dalam memantau dan mengendalikan perilaku oportunistik manajemen karena dewan komisaris yang lebih besar berkaitan dengan lebih banyak pengalaman dan keahlian sehingga dapat meminimalkan masalah keagenan yang berdampak pada kenaikan kinerja perusahaan dan pembayaran dividen (Ntim 2011, 2015).

Kehadiran direktur luar dianggap penting dalam memastikan bahwa sebuah sistem tata kelola yang efektif diizinkan untuk beroperasi dalam perusahaan karena direktur luar telah lebih mandiri dari manajemen (Fama, 1980). Direktur independen berperan untuk mengawasi dewan direksi dan diharapkan mengurangi pengaruh manajerial (Bonazzi dan Islam 2007; Daily dan Dalton 1994; Henry 2006; Hijazi dan Conover 2011; Muth dan Donaldson 1998; Westphalia 1999). Mekanisme monitoring yang dilakukan oleh dewan

independen yang lebih besar dianggap dapat memberikan peran penting dalam membatasi atau mengendalikan masalah agensi. McKnight dan Mira (2003) dan Henry (2004) berpendapat bahwa biaya agensi akan lebih rendah jika dewan memiliki jumlah direktur independen yang semakin tinggi.

Secara khusus baik kehadiran direksi independen dan frekuensi rapat dewan memainkan peran penting dalam memperkuat fungsi pemantauan direksi sehingga mengurangi masalah agensi (Ghosh, 2006, Shleifer dan Vishny, 1997; Jensen dan Meckling, 1976). Frekuensi rapat dewan terkait dengan praktik tata kelola yang baik. Pemantauan dewan diharapkan meningkat seiring meningkatnya frekuensi rapat dewan (Knyazewa, 2007). Lipton dan Lorsch (1992) berpendapat dewan yang sering bertemu memiliki kemungkinan lebih rajin dalam menjalankan tugasnya.

Di sisi lain, Easterbrook (1984) berpendapat bahwa dividen juga mengurangi masalah keagenan karena pembayaran dividen mengurangi jumlah arus kas bebas yang dihabiskan oleh manajemen pada proyek-proyek untuk keuntungan mereka sendiri dengan mengorbankan para pemegang saham dan dividen menarik perhatian lebih sering oleh pasar modal karena pembayaran dividen meningkat kemungkinan untuk menerbitkan saham biasa baru. Hubungan dividen dan biaya agensi menjadi penting yaitu saat dividen dibagikan manajer tidak dapat mengeksploitasi surplus keuangan untuk kepentingan mereka, yang berkontribusi pada meningkatnya kendali pemberi pinjaman dan pasar keuangan perusahaan.

Perusahaan dengan tata kelola yang baik didefinisikan sebagai perusahaan dengan kinerja keuangan yang baik karena manajer perusahaan berusaha semaksimal mungkin untuk meyakinkan investor bahwa mereka akan mendapatkan kembali modal yang telah diinvestasikannya, perusahaan dengan tata kelola yang baik mendistribusikan dividen tunai yang lebih tinggi (Kowalewski, dkk., 2007). Dalam penelitian Florackis (2008) memakai dua alternatif proksi untuk biaya agensi yaitu rasio total penjualan terhadap total aset (*asset turnover*) dan rasio penjualan, beban umum dan administrasi terhadap total penjualan (*SG&A*). Rasio *asset turnover* dapat mencerminkan

rasio pemanfaatan aset yang menunjukkan efektivitas manajemen menyebarkan aset perusahaan (Ang et. al, 2000; Singh dan Davidson, 2003; Fleming et. al, 2005). Singh dan Davidson (2003) menggunakan rasio *SG&A* sebagai proksi untuk biaya agensi. Proksi ini dinilai dapat mencerminkan kebijaksanaan manajerial dalam membelanjakan sumber daya perusahaan. Biaya tersebut mencakup biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memfasilitasi transaksi, perjalanan eksekutif, iklan, pemasaran, sewa dan utilitas lainnya.

Dengan demikian adanya dewan independensi, ukuran dewan, frekuensi rapat dan kebijakan dividen yang baik adalah salah satu indikator mekanisme pengurangan konflik keagenan yang terjadi dalam perusahaan. Penelitian mengenai pengaruh dewan independen, ukuran dewan, frekuensi rapat dan kebijakan dividen sebagai mekanisme untuk mengurangi *agency problem* perusahaan publik di sektor infrastruktur, utilities, transportasi; sektor industri dasar dan kimia; dan sektor industri barang konsumsi (*consumer goods*) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode penelitian selama dua tahun yaitu 2018-2019.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, maka pertanyaan penelitian yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1.2.1. Apakah dewan independen berpengaruh terhadap masalah agensi perusahaan?
- 1.2.2. Apakah kebijakan dividen berpengaruh terhadap masalah agensi perusahaan?
- 1.2.3. Apakah ukuran dewan berpengaruh terhadap masalah agensi perusahaan?
- 1.2.4. Apakah frekuensi rapat berpengaruh terhadap masalah agensi perusahaan?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

- 1.3.1. Untuk mengetahui pengaruh dewan independen terhadap masalah agensi perusahaan
- 1.3.2. Untuk mengetahui pengaruh kebijakan dividen terhadap masalah agensi perusahaan
- 1.3.3. Untuk mengetahui pengaruh ukuran dewan terhadap masalah agensi perusahaan
- 1.3.4. Untuk mengetahui pengaruh frekuensi rapat terhadap masalah agensi perusahaan

## **1.4. Manfaat Penelitian**

- 1.4.1. Penelitian ini memberikan hasil penelitian yang secara signifikan dapat mengurangi masalah agensi perusahaan.
- 1.4.2. Penelitian ini memberikan keterbaruan hasil penelitian dari penelitian sebelumnya yang bisa dijadikan studi empiris berikutnya.

1.4.3. Penelitian ini dapat dijadikan pandangan bagi perusahaan yang mengalami masalah agensi sehingga dapat mengurangi masalah agensi di dalam perusahaannya.

## **1.5. Sistematika Penulisan Skripsi**

Penelitian ini berlandaskan pada sistematika penulisan pedoman tugas akhir skripsi, yang terdiri dari:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini berisikan mengenai landasan teori, penelitian terdahulu yang dapat digunakan peneliti sebagai bahan acuan dan pengembangan hipotesis, serta model penelitian yang akan digunakan.

### **BAB III: METODE PENELITIAN**

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai desain penelitian yang akan diambil peneliti, menjabarkan identifikasi, definisi operasional, dan pengukuran variabel. Selain itu akan dijelaskan terkait jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi, sampel, dan teknik penyampelan, serta menganalisis data.

### **BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini merupakan gambaran umum mengenai objek penelitian, deskripsi data, menampilkan hasil analisis data serta pembahasan, inti

penelitian yang menjelaskan tentang gambaran umum perusahaan, deskripsi data, analisis dan pembahasan.

#### **BAB V: SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN**

Pada bab terakhir ini berisikan tentang simpulan dari penelitian yang telah dilakukan, keterbatasan yang dialami peneliti, dan saran yang ingin diberikan untuk penelitian selanjutnya maupun kepada perusahaan.